

PASUKAN ASKARIYAH SEBAGAI SUARA SUBALTERN KORBAN KONFLIK ACEH DALAM CERPEN SAFRIDA ASKARIYAH

Santi Andayani

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima
September 2018
Disetujui
Desember 2018
Dipublikasikan
Januari 2019

Keywords:

DOM, GAM,
Askariyah Forces,
TNI, Subaltern

Kata Kunci:

DOM, GAM,
Pasukan
Askariyahs, TNI,
Subaltern

ABSTRACT

The conflict that happened in Aceh from 1976 to 2005 has left deep wounds for Indonesia's national history. Many cases of human rights violations such as murder, rape, kidnappings committed by both GAM and TNI troops. To seized sovereignty, GAM established special forces such as the Askariyah Force, which consisted of widows and teenage girls. The stories of the struggle of Acehnese women who are members of the Askariyah Force are represented in the short story of Safrida Askariyah by Alimuddin published in Kompas on October 8, 2006. The problem of the research is whether the Askariyah Forces have been able to convey the subaltern voices that in this short story is represented by the main character of Safrida? This research is qualitative research. Data collections was done by literature study. The primary data source is short story Safrida Askariyah. Data analysis was done by descriptive analysis method. This research used the approach of the sociology literature and Spivak's view of the subaltern. The results showed that the Askariyah troops represented by the Safrida figures were not able to convey the subaltern voices of women of the Aceh conflict. This were evoked by the disappearance of the Askariyah Forces, Safrida was alienated from the community, and Askariyah Forces existence was not recognized in nowadays society.

ABSTRAK

Konflik yang melanda Aceh dari tahun 1976 hingga tahun 2005 telah meninggalkan luka yang dalam bagi sejarah nasional Indonesia. Banyak terjadi kasus pelanggaran HAM seperti pembunuhan, perkosaan, penculikan baik yang dilakukan oleh Pasukan GAM maupun TNI. Untuk merebut kedaulatan, GAM membentuk pasukan-pasukan khusus seperti Pasukan Askariyah yang beranggotakan para janda dan gadis-gadis remaja sebagai bala tentara. Kisah-Kisah perjuangan para wanita Aceh yang tergabung dalam Pasukan Askariyah terepresentasikan pada cerpen Safrida Askariyah karya Alimuddin yang dimuat di Kompas pada 8 Oktober 2006. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah Pasukan Askariyah telah bisa menyuarakan suara subaltern yang dalam cerpen ini direpresentasikan oleh tokoh utama Safrida sebagai suara wanita yang tertindas? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Sumber data primer adalah cerpen Safrida Askariyah. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra serta pandangan Spivak mengenai subaltern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasukan Askariyah yang direpresentasikan oleh tokoh Safrida ternyata tidak mampu menyampaikan suara subaltern para wanita korban konflik Aceh. Hal ini dibuktikan dengan lenyapnya pasukan Askariyah, teralienasi dari masyarakat, dan tidak diakui keberadaannya mereka di tengah masyarakat saat ini.

(C) 2019 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENDAHULUAN

Julukan Aceh sebagai Serambi Mekkah telah menunjukkan orientasi kultural masyarakat Aceh. Mekkah yang merupakan tanah suci bagi umat Islam membawa konotasi bahwa semua hal yang dikaitkan dengan nama itu pasti akan diasosiasikan dengan Islam. Identitas keislaman Aceh yang melekat jauh sebelum Indonesia merdeka, dalam perjalanan sejarahnya ternyata menjadi pemicu konflik antara Aceh dan Republik Indonesia, selain isu penting lainnya dalam politik desentralisasi yang dijalankan oleh Pusat (Djumala, 2013: 18-19). Konflik Aceh muncul mulai dari pemerintahan Presiden Soekarno, dan kembali memuncak pada masa Presiden Soeharto setelah Hasan Tiro memproklamasikan Gerakan Aceh Merdeka/ GAM pada 4 Desember 1976 yang bertujuan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia hingga konflik terus berlanjut pada pemerintahan pasca Soeharto dan akhirnya bisa mencapai persetujuan damai yang dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 (Djumala, 2013, h. 66).

Dalam perjalanan waktu tersebut, yaitu peristiwa konflik yang melanda Aceh dari tahun 1976 hingga tahun 2005 terutama ketika Pemerintah Pusat era Presiden Soeharto melancarkan Operasi Jaring Merah dan menjadikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) pada tahun 1989 telah meninggalkan luka yang dalam bagi sejarah nasional Indonesia. Banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM seperti pembunuhan, perkosaan, penculikan baik yang dilakukan oleh Pasukan GAM maupun TNI menjadi suatu trauma sendiri bagi para korban maupun keluarganya. Cerita-cerita tragis mereka mungkin akan terus berlanjut kepada beberapa anak cucu mereka sehingga menjadi luka

bawaan bagi generasi berikutnya.

Salah satu korban paling banyak dari diadakannya DOM hingga beberapa periode setelah pembubaran DOM adalah para wanita. Mereka kehilangan suami, anak, dan banyak para gadis yang kehilangan kesuciannya karena diperkosa. Kasus-kasus ini menurut berita-berita di media massa banyak yang belum terselesaikan dan menyisakan tanda tanya, seperti bagaimanakah proses hukum sampai pada proses HAM di mata internasional itu selanjutnya.

Apalagi kasus perkosaan, karena wanita yang diperkosa akan cenderung diam dan kebanyakan tidak mau disidangkan karena malu dan tentunya menyakitkan untuk mengingat semua kejadian itu, meskipun hal itu adalah haknya untuk menuntut keadilan. Struktur masyarakat yang patriarki, menghalangi seorang wanita untuk membeberkan aibnya sendiri apalagi menyangkut masalah seksualitas. Meskipun keadilan telah dia peroleh melalui meja hukum, namun kecenderungan masyarakat yang masih menganggap bahwa wanita yang diperkosa memiliki image yang buruk seperti dianggap tidak suci dan kotor menjadikan masalah perkosaan dimejahijaukan akan membawa dampak baik secara psikologis maupun sosiologis terhadap korbannya. Walaupun banyak yang berempati, tetapi pandangan yang merendahkan terhadap korban akan terus muncul, sehingga pada akhirnya si wanita korban tersebut menjadi tereklusi dari masyarakat.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam aneka kemasan simbol, menjadi rahasia umum di Serambi Makkah. Max Weber mengatakan bahwa perang dapat berubah menjadi semacam perbuatan terorisme yang dilakukan oleh negara atau kelompok yang dapat menjadi salah satu bentuk kekerasan,

dan dapat melanggar aturan. Dalam hal ini, negara mendominasi kelompok minoritas yang direpresentasikan dengan TNI yang mendominasi rakyat Aceh dengan melakukan tekanan-tekanan sehingga melahirkan konflik yang disambut secara sporadis oleh kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Dalam gerakannya, GAM memiliki pasukan-pasukan khusus diantaranya adalah laskar Inong Balee yang kemudian berganti nama menjadi Pasukan Askariyah. Pasukan ini dipimpin oleh seorang wanita dan personilnya adalah para janda (inong balee). Kebanyakan dari mereka adalah ibu-ibu yang telah kehilangan suami yang tewas pada masa diberlakukannya Daerah Operasi Militer (DOM). Akan tetapi, penyebutan itu kemudian tidak relevan lagi, sebab banyak anggotanya yang bukan hanya para janda, tetapi juga gadis-gadis remaja yang duduk di SMP maupun SMU sehingga mengubah nama laskar Inong Balee menjadi Askariyah, yakni bala tentara wanita yang bahu-membahu dengan laskar GSA (Gerakan Separatis Aceh) yang bermaksud memperjuangkan kembalinya kedaulatan bangsa Aceh di negeri sendiri.

Namun, setelah perjanjian damai antara Pemerintah RI-GAM di Helsinki ditandatangani pada tahun 2005, nasib kelompok ini tidak jelas. Yang jelas, jika ada wanita yang tertembak dalam Darurat Militer saat itu, tidak akan ada yang mengaku dari Laskar Inong Balee atau Pasukan Askariyah sehingga korban tersebut akan disebut sebagai sipil tak berdosa.

Pasukan Askariyah menjadi pasukan yang ingin meyuarkan suara-suara wanita Aceh yang menjadi korban kebiadaban TNI. Mereka ingin menuntut keadilan dengan cara mereka sendiri karena anggapan bahwa jalur hukum sudah tidak bisa diharapkan dan juga karena mereka adalah kelompok yang tersubordinasi. Meskipun tujuannya adalah

untuk memperjuangkan kembali kedaulatan Aceh namun kepentingan pribadi untuk membalas dendamlah yang menjadi alat utama penyatuan kelompok ini. Spivak menyebut kelompok-kelompok sosial yang "terpinggirkan" (*other*) ini dikenal dengan istilah *subaltern*.

Istilah "*subaltern*" bukanlah istilah Spivak sendiri. *Subaltern* merupakan istilah bagi kelompok sosial subordinat yang menjadi korban hegemonik kekuasaan, yang dipopulerkan oleh pemikir sosial asal Italia, Antonio Gramsci. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Berger dan Luckman bahwa *subaltern* merupakan kelompok marjinal yang selalu menjadi objek bagi kelas yang dominan dan berkuasa. Merekalah kelompok yang tidak pernah ditulis dalam sejarah. Kelompok *subaltern* tidak monolitik, mereka mempunyai kompleksitasnya sendiri, dan meskipun mereka berbicara orang tidak menaruh perhatian pada kisahnya (<http://siti-alvi-fisip12.web.unair.ac.id>).

Kisah-kisah perjuangan para wanita Aceh yang tergabung dalam Pasukan Askariyah antara lain terepresentasikan pada cerpen Safrida Askariyah karya Alimuddin yang dimuat di Kompas pada 8 Oktober 2006. Dengan pendekatan sosiologi sastra yang menganggap bahwa karya seni sebagai dokumen sosial (Wellek dan Warren, 1990, p. 111), karya sastra juga merupakan refleksi dan kenyataan di dalamnya sebagai sesuatu yang sudah ditafsirkan, maka akan diperoleh gambaran bagaimana para wanita korban konflik Aceh yang hampir berputus asa itu dilatih, dididik untuk menjadi wanita perkasa yang militan dalam Pasukan Askariyah.

Pasukan Askariyah merupakan kelompok sosial subordinat yang menjadi korban hegemonik kekuasaan. Jadi, bisa dikatakan bahwa Pasukan Askariyah merupakan *subaltern*. Maka, yang menjadi pertanyaannya

adalah apakah Inong Balee atau yang kemudian berganti nama dengan Askariyah telah bisa menyuarakan suara subaltern yang dalam cerpen ini direpresentasikan oleh tokoh utama Safrida sebagai suara wanita yang tertindas dalam kasus permasalahan antara GAM-TNI? Ataukah Pasukan Askariyah hanya merupakan alat perpanjangan politik GAM untuk memperoleh dukungan pasukan melawan TNI?

Dengan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pasukan Askariyah sebagai suara subaltern yang direpresentasikan oleh tokoh utama Safrida sebagai suara wanita yang tertindas dalam kasus permasalahan antara GAM-TNI dalam cerpen Safrida Askariyah. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa menjadi wawasan mengenai sejarah konflik yang pernah terjadi di Indonesia khususnya Aceh beserta dampaknya dan juga menjadi pengingat untuk terus bisa menyelesaikan sampai tuntas permasalahan yang timbul akibat konflik Aceh, terutama para korban wanitanya untuk mendapatkan keadilan.

Untuk membantu pemecahan masalah, sebagai kerangka teori akan memanfaatkan pemikiran Spivak mengenai subaltern. Gayatri Chakravorty Spivak dalam salah satu ceramahnya di Indonesia pada Maret 2006 pernah mengatakan, "Tak ada orang tertindas yang bisa bicara. Apalagi ia perempuan, ia akan begitu saja dilupakan. Tidak dapat berbicara adalah metaphor karena ia mencoba berbicara sehingga secara metaphor Anda dapat mengatakan tidak ada keadilan. Orang tidak menaruh perhatian pada 'cerita' subaltern. Kalau sekarang mungkin ia disebut teroris" (<http://kunci.or.id/articles/membaca-gayatri-chakravorty-spivak/>)

Asumsi Spivak mengenai suara subaltern lahir dari pengamatannya tentang kasus bunuh diri para janda yang salah

satunya adalah Bhubaneswari Bhaduri yang berusaha menutup-nutupi keterlibatannya dalam sebuah gerakan resistensi bersenjata melalui ritual bunuh diri. Hampir sepuluh tahun kemudian terungkap bahwa dia adalah anggota samitis, organisasi yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan India. Dia dipercaya melakukan pembunuhan politik yang gagal dilaksanakannya. Mungkin inilah yang menyebabkan Bhubaneswari bunuh diri. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan tetapi tidak bisa disuarakan. Dalam tubuhnya yang mati seolah merupakan 'teks sastra' yang bercerita 'perempuan membunuh diri adalah sebuah resistensi yang tidak dikenal' (Morton, 2008, h. 197).

Spivak melakukan dekolonisasi di dunia selatan agar semua elemen bisa berbicara dan bisa bersuara, termasuk perempuan subaltern. Subaltern merupakan istilah bagi kelompok sosial subordinat yang menjadi korban hegemonik kekuasaan, yang dipopulerkan oleh pemikir sosial asal Italia, Antonio Gramsci. Konsepsi subaltern ini adalah pandangan yang kritis tentang kondisi poskolonial. Utamanya nasionalisme poskolonial. Spivak berpendapat bahwa kemerdekaan politik banyak bekas koloni Eropa pada abad ke-20 gagal mengarahkan kelompok-kelompok subaltern yang tertindas, seperti kaum perempuan, kaum tani, kaum miskin desa atau orang buta huruf pada kemerdekaan sosial (Morton, 2008, h. 9).

Kesadaran dan eksistensi orang-orang terjajah umumnya menjadi inferior di hadapan penjajah yang lebih dikesankan memiliki superioritas. Merasa inferior, maka orang-orang terjajah lebih banyak diam dan bisu. Orang-orang terjajah akan senantiasa dimarginalkan, diasingkan, dibaca, serta dikendalikan oleh kaum imperialis penjajah. Serta mental mereka terus dirusak dengan stigma negatif sebagai bangsa kalah, terbelakang, miskin, dan lain

sebagainya. Pemikir kolonial memposisikan mereka yang terpinggirkan ini sebagai satu bentuk seragam, dimana mereka hanya dilabeli sebagai “masyarakat terjajah” atau “pribumi” tanpa mau tahu etnisnya, gender, pendidikan, dan lain-lain. Spivak memasukkan variabel perempuan, karena perempuan bahkan di masyarakat “normal” saja sudah dapat dikelompokkan sebagai subaltern yakni dalam masyarakat berstruktur patriarki. Spivak kemudian menyimpulkan bahwa kelompok-kelompok subaltern memang tidak bisa berbicara.

Selain pandangan Spivak mengenai subaltern, akan dimanfaatkan pula pandangan Feminis Liberal mengenai negara sebagai penguasa yang tidak memihak antara kepentingan kelompok yang berbeda yang berasal dari teori pluralisme negara. Mereka menyadari bahwa negara itu didominasi oleh kaum pria, yang terleleksi menjadi kepentingan yang bersifat “maskulin”, tetapi mereka juga menganggap bahwa negara dapat didominasi kuat oleh kepentingan dan pengaruh kaum pria tadi. Singkatnya, negara adalah cerminan dari kelompok kepentingan yang memiliki kendali atas negara tersebut. Untuk kebanyakan kaum Liberal Feminis, perempuan cenderung berada “di dalam” negara hanya sebatas warga negara bukannya sebagai pembuat kebijakan sehingga dalam hal ini ada ketidaksetaraan perempuan dalam politik atau bernegara (<http://digilib.unila.ac.id/448/4/BAB%20II.pdf>).

Gerakan pembebasan perempuan menjadi ragam pokok feminisme masyarakat Barat kontemporer. Diantaranya, bahasa yang sering digunakan oleh feminisme awal adalah “hak” dan “kesetaraan”, dan feminisme akhir 1960-an menggunakan istilah “penindasan” dan “kebebasan”. Penindasan adalah ketiadilan yang membatasi kemerdekaan individu atau

kelompok. Untuk keluar dari penindasan, pembebasan adalah jalannya. Jadi, pembebasan ada hubungannya dengan penindasan. Pada prinsipnya, kebebasan bukanlah pencapaian akhir suatu keadaan melainkan proses eliminasi bentuk-bentuk penindasan yang muncul secara terus-menerus. Untuk melakukan pembebasan maka diadakanlah perlawanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Sumber data primer adalah cerpen Safrida Askariyah. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analisis. Adapun langkah analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data berupa dialog ataupun narasi dalam cerpen yang berkaitan dengan permasalahan, lalu menganalisis data yang terkumpul untuk mengetahui apakah Inong Balee atau yang kemudian berganti nama dengan Askariyah telah bisa menyuarakan suara subaltern melalui tokoh utamanya dan untuk mengetahui posisi pasukan tersebut dalam kancah konflik. Terakhir, dilakukan penyimpulan hasil analisis dan penyajian laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cerpen berjudul Safrida Askariyah berkisah tentang seorang gadis bernama Safrida yang orang tuanya dibunuh oleh para tentara RI yang sedang bertugas mengatasi konflik Aceh dan bersamaan itu pula Safrida diperkosa secara beramai-ramai oleh mereka. Safrida kemudian memutuskan ikut bergabung dengan Pasukan Askariyah sebagai jalan untuk membalaskan dendamnya.

Posisi Safrida dalam cerpen bisa dikatakan sebagai representasi dari suara subaltern karena dia menjadi bagian dari kelompok sosial subordinat yang menjadi

korban hegemonik kekuasaan yang dalam hal ini adalah negara yang hadir dalam bentuk tentara RI. Akibat konflik yang berkepanjangan dan banyaknya ketertindasan yang terjadi di Aceh, menjadikan kesadaran dan eksistensi rakyat Aceh menjadi inferior terutama dihadapan tentara RI yang dianggap memiliki superioritas. Dominasi tentara RI yang kuat di wilayah Aceh memberikan semacam kekuasaan untuk bisa melakukan apa saja atas nama keamanan negara. TNI digambarkan sebagai pihak yang menggunakan kekuasaannya untuk bebas menuduh setiap penduduk yang dianggap anggota GAM. Bahkan, tak jarang pula sebelum kata pembelaan sampai terucap mereka sudah dihakimi dengan rentetan tembakan. Senjata dan seragam militer telah menjadi simbol dominasi maskulinitas yang kuat. Seperti apa yang dialami oleh ayah Safrida seperti kutipan dalam cerpen berikut ini.

Dan sekitar sepuluh orang tentara naik ke rumah Aceh tanpa melepas sepatu. Empunya rumah tak berlutut. Pintu rumah disepak-sepak. Ada beberapa yang masuk ke kroong padee. Dan para tentara itu tidak mendapatkan GAM seperti yang mereka tuduhkan. Memang aneh sekali serdadu-serdadu pemerintahan itu, main tuduh saja kerjanya! "Kau GAM, ya?" bentak tentara itu kasar. "Bukan Pak, saya ini rakyat biasa," Bapak tampak gentar. "Pasti kamu sembunyikan GAM di rumah kamu?!" sambung kawannya juga dengan tak kalah kasarnya. "Periksa rumah ini!" Ada GAM di sini...!" Teriakan itu bagai halilintar di telinga Safrida. Dan... "Dor...Dor..." tubuh Bapak bersimbah darah. Dua pelor menembus kepala

lelaki itu. Tanpa bertanya terlebih dahulu.

Inferioritas menjadikan rakyat Aceh menjadi lebih banyak diam dan bisu. Bahkan, peristiwa penembakan tersebut terjadi ketika perjanjian perdamaian antara RI dan GAM yang diadakan di Helsinki tengah ditayangkan di televisi. Bagi tokoh Safrida, kata 'damai' yang didengungkan oleh pemerintah RI dengan GAM dalam televisi tersebut menjadi kata yang aneh baginya, karena damai yang mereka sepakati tidaklah sama dengan damai yang dipahami Safrida. Ketika kedua orang tuanya dibunuh di depan matanya dan kemudian ketika kegadisannya direnggut secara beramai-ramai oleh para tentara militer, maka tidak ada lagi kata 'damai' dalam hidupnya.

Ketika Safrida muncul ditengah penembakan ayahnya yang diduga anggota GAM, para tentara langsung melihat Safrida sebagai perempuan yang berhak untuk diintimidasi. Tentara militer melihat Safrida sebagai barang bagus dan obyek pemuas seks laki-laki. Dia sudah tidak dipandang lagi sebagai seorang manusia yang memiliki martabat dan derajat yang sama. Bagi para lelaki itu, wanita yang muncul dihadapannya adalah sebagai seonggok daging yang bisa dimakan dan dimuntahkan kapan saja tanpa memperdulikan nasibnya.

"Kamu cantik juga, ya?" tentara itu membabi buta.

"Bek...Bek..." Safrida menghiba-hiba. Meronta sejadi-jadinya. Tubuhnya makin jauh diseret ke semak-semak. "Barang bagus, ya?"

"Ya nih...Tapi aku duluan ya...Ha... ha..." Setan itu terpingkal-pingkal. "Ayo sayang..."

"Jangan..." Safrida menjerit

panjang. Tak ada penolongnya. Tubuh menjadi arena pergulatan.

Kejadian pembunuhan orang tua dan pemerkosaan yang dialami Safrida menjadi suatu kenangan pahit yang akhirnya menjelma menjadi sebuah dendam. Kenangan tersebut mengingatkannya bahwa ia adalah perempuan yang telah ditindas dan diberlakukan secara tidak adil oleh golongan berkuasa yaitu oleh para lelaki yang berdiri dibalik kekuatan militer negara. Dampak dari pemerkosaan tersebut, Safrida senantiasa dimarginalkan dan diasingkan bahkan oleh kaumnya sendiri.

Safrida yang diliputi oleh rasa dendam ingin berontak melawan ketertindasan itu, sehingga ketika panglima GAM suatu hari datang ke kampungnya untuk mengajak mereka melawan TNI, hati Safrida yang dipenuhi dendam itu bangkit dan bergabung untuk melakukan perlawanan. Perlawanan itu diwujudkan dengan ikut bergabung dalam pasukan Inong Balee yang kemudian berubah namanya menjadi Askariyah.

Dalam catatan kaki cerpen ini disebutkan bahwa Askariyah merupakan sebutan pasukan perempuan GAM. Pada awalnya dinamakan Inong Balee, tapi belakangan, karena anggota dari pasukan ini bukan berasal dari inong balee saja (janda), tapi juga banyak gadis-gadis, namanya diganti menjadi Askariyah, yakni bala tentara wanita yang bahu-membahu dengan laskar GSA/GAM memperjuangkan kembalinya kedaulatan bangsa Aceh di negeri sendiri.

Laskar inong belakangan makin mekar, menurut pengakuan beberapa Gubernur GSA (Gerakan Separatis Aceh), yang bertanggung jawab terhadap pasukan wanita itu sekarang telah mencapai ribuan orang dan tersebar di seluruh wilayah Aceh. Berdasarkan informasi Kontras (<https://www.library.ohio.edu/>

indopubs/2001/02/23/0070.html) yang pernah menemui seseorang yang mereka sebut sebagai "komandan" laskar Inong Balee, rekrutmen mereka tergolong ketat dan harus didasari keinginan sendiri serta mendapat izin dari orang tuanya. Bahkan, seorang pemimpin GAM di Wilayah Batee Iliek mengakui banyak orang tua yang menyatakan gembira jika anak gadisnya dapat diterima sebagai anggota Askariyah.

Setiap anggota Askariyah, selain mendapat latihan militer, juga diberikan pendidikan agama serta hukum internasional, hukum humaniter, serta pendidikan intelijen. Setelah mengikuti latihan sampai berbulan-bulan di komando GAM setiap wilayah, para Askariyah ada yang langsung bergerilya di hutan-hutan dan banyak juga yang bertugas sebagai intelijen. Sifat menonjol pada wanita seperti telaten dan jeli dimanfaatkan oleh GAM untuk membebaskan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan kejelian. Contohnya yaitu jajaran GSA Wilayah Pase (Aceh Utara) yang mempercayakan pekerjaan merakit bom dan granat kepada Askariyah di bawah komando laskar Cut Meutia. Selain itu, dari informasi diketahui bahwa seorang calon anggota *Inong Balee* mendapatkan latihan militer selama tiga bulan. Pelatihnya adalah pria senior yang telah mendapat pengalaman latihan militer di luar negeri. Untuk jenis senjata yang bisa digunakan adalah M-16, AK, sten, bazoka, kasyaf, serta berbagai jenis dan kaliber pistol. Bahkan tentunya mahir pula menggunakan granat. Dikatakan pula untuk wilayah Pase, mayoritas dari 472 wanita anggota pasukannya masih gadis. Mereka mengaku rela menunda kawin agar perhatian dan waktunya bisa lebih terkonsentrasi kepada tugas membebaskan bangsa Aceh dari penjajahan.

Anggota laskar *inong* GAM yang masih gadis itu, juga diperlukan untuk memudahkan

penyusupan ke komando pasukan RI. Penyusupan melalui trik-trik “berpacaran” dengan prajurit TNI/Polri itu, katanya, merupakan salah satu teknik mendapatkan bocoran informasi penting yang dibutuhkan GSA. Apalagi mereka konon cantik-cantik. Tak heran, pihak GSA suka mengklaim bahwa di antara mereka ada yang menjadi istri pejabat militer, pejabat Pemda maupun pengusaha bahkan wartawan. Dari sana akses GSA tumbuh dan berkembang (<http://kerajaanpasai.blogdrives.com/archive/675.html>).

Hal di atas serupa dengan apa yang diungkapkan oleh pengarang yang menceritakan bahwa karena banyaknya gadis-gadis seperti Safrida yang ikut bergabung dalam Pasukan Inong Balee maka nama pasukan ini diganti menjadi Askariyah.

Safrida naik gunung. Bergabung dengan Pasukan Inong Balee. Mendapat latihan militer yang dilatih mualim. Ternyata banyak dara seperti Safrida yang bergabung. Nama pasukan itu diubah. Tak lagi inong balee, tapi Askariyah. Berbulan-bulan Safrida di gunung. Tiap hari latihan berat. Tangannya kasar bukan main. Mengokang senjata bukan hal baru. Sudah mahir menggunakan senjata.

Wanita-wanita ini mendapat pelatihan supaya bisa melakukan perlawanan fisik. Stereotip wanita yang lemah dan bodoh akan berubah ketika wanita masuk dalam pasukan ini. Latihan fisik seperti memegang senjata dan pada akhirnya praktek untuk membunuh lawan-lawannya, yaitu para lelaki yang tergabung dalam pasukan militer TNI sebagai liyan menjadikan mereka wanita-wanita yang pemberani. Safrida sendiri bahkan

dipuji sebagai wanita perkasa yang mewarisi semangat para pejuang wanita Aceh seperti Cut Nyak Dien, Cut Meutia, dan Laksaman Malahayati. Bahkan karena keberaniannya itu, Safrida disejajarkan dengan petinggi-petinggi GAM. Safrida pun dilantik menjadi panglima pasukan Askariyah. Hal ini menunjukkan bahwa wanita ketika mendapat gembleran atau pelatihan yang sama dengan pria, dia pun akan memiliki kekuatan yang sama pula. Jadi, tidaklah benar wanita itu lemah semenjak dia dilahirkan. Konstruksi budaya dan sosialah yang menjadikan adanya stereotip bahwa wanita itu lemah dan tidak berdaya. Ketika potensi-potensi wanita itu digali kemudian dilatih, dan dididik, maka kemampuannya juga tidak akan kalah dengan pria. Oleh karena itu, pendidikan, pengetahuan, dan latihan adalah salah satu kunci yang bisa mensejajarkan wanita dengan pria.

Mendadak nama Safrida menjadi tenar. Ia disejajarkan dengan petinggi-petinggi GAM yang sama beracunnya. Penyisiran dilakukan besar-besaran untuk mencari perempuan bernama Safrida. Di pedalaman hutan bakau Manyak Payed, Safrida dilantik oleh panglima menjadi komandan pasukan Askariyah karena berprestasi tinggi.

Tergabungnya wanita-wanita yang tertindas ini dalam Pasukan Askariyah menjadi alat bagi mereka yang digolongkan subaltern untuk menyuarakan suara mereka dalam menuntut keadilan. Namun, benarkah demikian?

Jika melihat sejarah pembentukan dari pasukan Inong Balee, pasukan ini muncul dibawah naungan pasukan GAM, maka segala pendanaan dan struktur organisasinya harus mendapatkan persetujuan dari panglima

GAM. Segala kegiatannya pun tentunya akan didekte oleh pasukan GAM. Dilihat dari sisi organisasinya, maka Pasukan Askariyah ini tidak lebih sebagai salah satu alat atau senjata untuk melawan pasukan TNI yang dianggap sebagai penjajah Aceh. Para wanita ini dilatih untuk bisa memanfaatkan tubuh dan kecantikannya dalam merayu prajurit TNI demi bisa mendapatkan informasi. Bahkan, mereka melakukan penyamaran dengan menjadi istri para pejabat militer dan pemerintahan. Secara tidak sadar tubuh para wanita ini kembali dieksploitasi demi kepentingan GAM. Meskipun eksploitasi kali ini dikompromi oleh para wanita korban tersebut. Hal ini karena mereka juga memiliki tendensi kepentingan pribadi yaitu pemenuhan balas dendam.

Wanita itu berubah licin dan berbisa. Berbagai cara ditempuh untuk menghabisi nyawa serdadu pemerintahan. Wajahnya yang memikat tak jarang jadi tameng. Digoda dan diajak ke tempat terasing. Lalu diracuni setiba di sana. Bukan sekali-dua kali berhasil menyisipkan bom di pos tanpa dicurigai sedikit pun.

Pengorbanan dan loyalitas mereka terhadap GAM ternyata juga tidak begitu diperhitungkan. Pada saat keadaan terjepit, yaitu ketika banyak anggota pasukan GAM yang tertangkap dan dipaksa menyerahkan diri karena perjanjian di Helsinki telah disepakati, para wanita ini sekali lagi tertindas. Mereka akan ditangkap dan dipenjara lebih lama jika tidak menyerahkan dirinya segera. Sekali lagi, dominasi kekuatan militer dan hukum yang seharusnya bisa melindungi wanita-wanita ini ketika diperlakukan secara tidak adil, akan menjadi kekuatan yang akan mengekang

kebebasan mereka dan menghukum mereka yang tidak mentaatinya.

Selain itu, ancaman tidak datang dari TNI saja, namun ancaman itu justru datang dari kelompok GAM sendiri. Ketakutan akan dibocorkannya siapa saja yang menjadi anggota dari Pasukan Askariyah membuat para wanita yang tidak ingin mendapat hukuman berat itu terpaksa harus menyerahkan diri mereka sendiri seperti apa yang digambarkan dalam cerpen.

Safrida dan anak buah Askariyahnya dalam posisi terjepit. Tertangkap tinggal menunggu waktu. Bencana. Galinggeng pasti akan memberitahukan tempat persembunyian mereka. Safrida kalut tak terkira. Akhirnya mereka ikut menyerah. Tapi dendam kesumat tak raib. Bagusnya menyerahkan diri, ia dan anak buahnya itu dibebaskan beberapa minggu kemudian. Dikembalikan ke kampung masing-masing dengan penjagaan ketat.

Label GAM yang sudah dicap sebagai pemberontak, para pembuat makar nasional mengikutsertakan para wanita ini menjadi korban-korban dominasi maskulintas. Sekali lagi, suara mereka terbungkam oleh para aparat hukum dan lingkungan yang membesarkan mereka sendiri. Mereka dijaga secara ketat, dikontrol, dan diawasi gerak-geriknya supaya tidak melakukan perbuatan yang dianggap menyimpang dari aturan hukum.

Ketika perjanjian damai antara Pemerintah RI-GAM telah terwujud, para gadis yang senasib dengan Safrida mungkin akan merasakan hal yang sama bahwa mereka kembali teralienasi di tengah masyarakat. Tidak hanya oleh para pria namun juga masyarakat

yang mengetahui bahwa dia adalah wanita bekas anggota GAM dan seorang wanita yang tidak suci lagi karena pernah diperkosa.

Melihat kejadian itu, ada iri yang menyelusup di benak Safrida. Di kampungnya, semua perempuan sudah menjadi ibu, selain dirinya. Tak satu pun pria yang mau memperistri dirinya. Padahal usianya tak muda lagi. Bagaimana pula ia punya anak? Sebagai perempuan normal, ingin sekali ia bersuami dan punya anak.

Oleh karena itulah, meski perjanjian damai telah disepakati, Safrida dan wanita-wanita yang senasib dengannya tidak akan pernah bisa mengenal kata damai lagi.

Damai ini tak bisa membuat gadisnya kembali. Ketakutannya karena diperkosa tak raib. Mak dan Bapak tak juga kembali. Damai ini tak bisa membuatnya bisa peroleh suami dan anak yang diidamkan lama. Enak saja pemerintah mengira, dengan teken janji damai, semua akan kembali laik semula. Damai itu hanya di selebar atau beberapa kertas. Sementara perih jiwa di sekujur tubuh. Sembuhkan luka itu? Safrida bisakah berdamai dengan duka di sekujur tubuh?

Pada siapa mereka berlindung, ketika kekuatan hukum yang seharusnya melindunginya ternyata tidak berpihak padanya. Justru mereka, tentara yang dianggap akan melindungi mereka dari marabahaya, ternyata adalah pihak yang telah mengoyak-ngoyak masa depannya. Ketika para pria yang berlindung pada seragam militer yang

seharusnya mencari para manusia bejat, yang berbuat mungkar, ketidakadilan, dan angkara murka lainnya ternyata mereka inilah yang telah merenggut ketidakadilan itu sendiri dan menodainya dengan bentuk penindasan dan kekerasan pada Safrida dan gadis lainnya. Para wanita Aceh ini akan senantiasa dimarginalkan, diasingkan, dibaca, serta dikendalikan oleh tentara RI. Mental mereka terus dirusak dengan stigma negatif sebagai wanita yang kotor, pembontak, pengkhianat negara, dan lain sebagainya. Hal ini senada dengan pemikiran Spivak yang memasukkan variabel perempuan dalam kelompok subaltern yang tidak bisa berbicara.

PENUTUP

Pasukan Askariyah yang direpresentasikan oleh tokoh Safrida ternyata tidak mampu menunjukkan suara subaltern para wanita korban konflik Aceh. Hal ini dibuktikan dengan lenyapnya pasukan Askariyah, teralienasi dari masyarakat, dan tidak diakui keberadaannya di tengah masyarakat saat ini.

Kemudian, jika melihat sejarah pembentukan dari pasukan Askariyah yang sebelumnya bernama Inong Balee adalah pasukan yang berada dibawah naungan pasukan GAM, maka Pasukan Askariyah ini tidak lebih sebagai salah satu alat atau senjata untuk melawan pasukan TNI. Dengan label GAM yang sudah dicap sebagai pemberontak ataupun pembuat makar nasional, menjadikan para wanita yang tergabung dalam pasukan ini menjadi korban dominasi maskulintas dan sekali lagi, suara mereka terbungkam oleh para aparat hukum dan lingkungan yang membesarkan para wanita itu sendiri. Setelah perjanjian damai terwujud pun, para wanita ini dijaga secara ketat, dikontrol, dan diawasi gerak-geriknya supaya tidak melakukan

perbuatan yang dianggap menyimpang dari aturan hukum. Seperti tokoh Safrida yang teralienasi, tidak hanya dari para pria namun juga masyarakat yang mengetahui bahwa dia adalah wanita bekas anggota GAM dan seorang wanita yang tidak suci lagi karena pernah diperkosa. Pasukan Askariyah menjadi golongan subaltern yang pada akhirnya tidak dapat berbicara dan menentukan pilihan hidupnya.

Daftar Pustaka

- Djumala, Darmansjah. (2013). *Soft Power untuk Aceh Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Morton, Stephen. (2008). *Gayatri C Spivak. Etika Subaltern dan Kritik Penalaran Poskolonial*. Yogyakarta: Penerbit Pararton.
- Wellek, Rene & Warren, Austin. (1990). *Teori Kesusastraan*. Jakarta: PT. Gramedia.

Daftar Laman

- Cerpen Safrida Askariyah. Diakses tanggal 2 Februari 2018 dari <https://cerpenkompas.wordpress.com/2006/10/>
- Juliastuti, Nuraini. 2009. Membaca Gayatri Chakravorty Spivak. Diakses tanggal 12 Februari 2018 dari <http://kunci.or.id/articles/membaca-gayatri-chakravorty-spivak/>
- Laskar Inong Menyabung Nyawong. Diakses tanggal 12 Februari 2018 dari <http://kerajaanpasai.blogdrives.com/archive/675.html>.
- Sofyan Ibrahim Tiba SH (Wakil GAM di KBMK): GAM Masih Memerlukan HDC dari KONTRAS No. 125 TAHUN IV 21 - 27 FEBRUARI 2001 . Diakses tanggal 12 Februari 2018 dari <https://www.library.ohio.edu/indopubs/2001/02/23/0070.html>
- Spivak merespon globalisasi atau standarisasi nilai tunggal. Diakses tanggal 12 Februari 2018 dari <http://siti-alvi-fisip12.web.unair.ac.id/20tunggal.html>
- Feminisme Liberal. Diakses tanggal 10 Februari 2018 dari <http://digilib.unila.ac.id/448/4/BAB%20II.pdf>